

Judul : DPR ingin status guru PPPK cepat tuntas: genjot kualitas pendidikan  
Tanggal : Senin, 20 Juli 2026  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 3

## Genjot Kualitas Pendidikan DPR Ingin Status Guru PPPK Cepat Tuntas



La Tinro La Tunrung

ANGGOTA Komisi X DPR La Tinro La Tunrung mendorong Pemerintah mempercepat pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kepastian status kepegawaian guru menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan nasional.

Menurut La Tinro, kepastian status kepegawaian dapat meningkatkan motivasi para guru untuk terus mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pendidikan.

"Penyelesaian status guru PPPK paruh waktu juga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar La Tinro di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Namun, penyelesaian status guru PPPK paruh waktu perlu disertai target tahunan yang realistis agar pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi. Ia mencontohkan tahun 2027. Pemerintah menargetkan PPPK paruh waktu yang diangkat menjadi penuh waktu sebanyak 20 ribu orang.

Menurutnya, dengan adanya target yang jelas akan membantu DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemerintah. Sehingga setiap capaian maupun kendala dalam proses pengangkatan PPPK dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.

La Tinro menambahkan, evaluasi terhadap kinerja kementerian tidak seharusnya hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang berhasil disera atau hasil pemeriksaan laporan keuangan. Tapi evaluasi harus mencakup sejauh mana target dan program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ia memuji capaian

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan harus diikuti dengan capaian program pendidikan yang konkret dan terukur.

"Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah penyelesaian status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," kata politisi Gerindra ini.

Dia berharap, Kemendikdasmen segera menyusun peta jalan yang realistis, bertahap, dan dilengkapi target yang terukur dalam menyelesaikan status guru PPPK paruh waktu. Dengan adanya peta jalan tersebut, pelaksanaan program dapat dipantau secara berkala sekaligus memberikan kepastian karier dan status kepegawaian bagi para tenaga pendidik.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menambahkan, status PPPK seharusnya tidak bisa dirumahkan. Karena Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak mereka sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pemerintah semestinya melakukan penataan aparatur secara matang sejak awal, di mana penambahan personel harus selaras dengan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal," ujar Khozin di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Jika kondisi fiskal daerah sedang sulit, lanjutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak boleh menjadikan pengurangan pegawai sebagai jalan pintas. Tapi dilakukan efisiensi pada pos belanja operasional yang tidak mendesak atau tidak penting dan bersifat seremonial.

Ia mencontohkan beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan Pemda. Antara lain memangkas anggaran perjalanan dinas, menunda seminar yang tidak mendesak, hingga menghapus agenda seremonial lainnya yang tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Khozin mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan audit nasional terkait formasi dan pembiayaan PPPK. Audit ini harus mencakup penelaah instansi, fungsi pelayanan, masa kontrak, hingga kemampuan APBD dalam membiayai pegawai hingga akhir masa perjanjian kerja. ■ TIF